

BAB II

DESKRIPSI SUBJEK & OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk pada tanggal 13 September 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon dari dokumen pribadi profil DSPPPA, yaitu :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dengan mengacu kepada visi Walikota dan Wakil Walikota 2013 - 2018, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon untuk tahun 2013-2018 menetapkan visi yaitu sebagai berikut :

Terwujudnya pelayanan sosial, perempuan, anak dan masyarakat yang maju dan mandiri tahun 2018.

Sedangkan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon tahun 2013 – 2018 dalam dokumen pribadi DSPPPA Kota Cirebon, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG).
3. Meningkatkan kualitas anak melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
4. Meningkatkan pemberdayaan aparatur dan masyarakat kelurahan.

Dengan adanya fungsi dan visi misi tersebut terbentuklah struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon terdiri dari sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan

3. Bidang Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:

- a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- b. Seksi Perlindungan Perempuan.

5. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:

- a. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak.

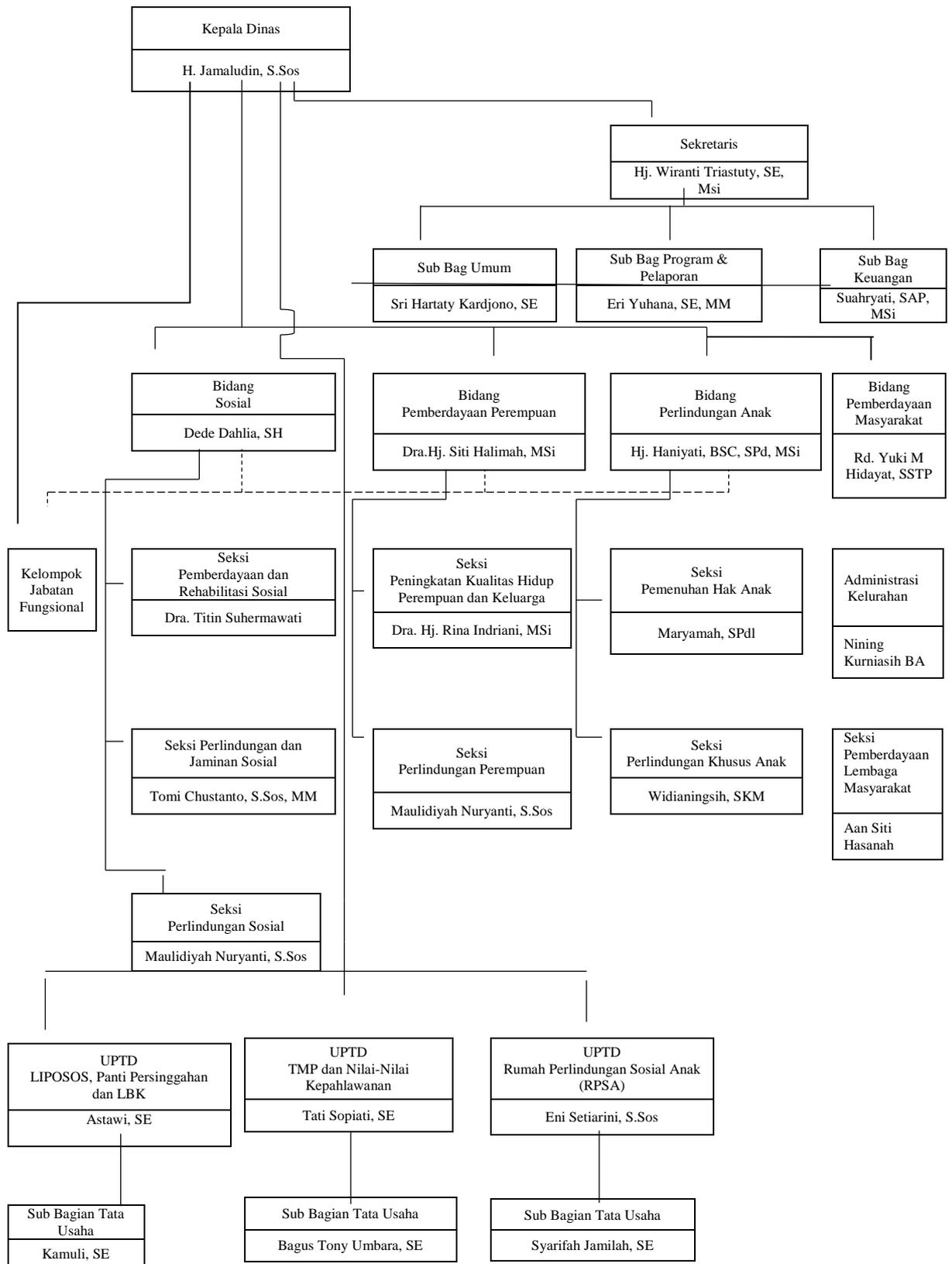
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Seksi Administrasi Kelurahan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah gambaran bagan struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, yaitu :



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon. Sumber : Dokumen pribadi DSPPPA Kota Cirebon

B. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Program Wadul Bae

Dari data yang peneliti dapat dalam dokumen pribadi terkait profil dan program kerja P2TP2A dan program Wadul Bae tahun 2015-2020, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2009-2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 463.05/Kep.374BPMPPKB/2010 adalah salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Adapun visi dan misi dari P2TP2A yaitu :

Visi :

Mewujudkan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Misi :

1. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan, dan *trafficking* atau perdagangan terhadap perempuan dan anak.
2. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi, serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.

3. Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Tujuan didirikan P2TP2A yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan *gender* dengan mengintegrasikan strategi dalam berbagai jenis kegiatan pelayanan terpadu untuk peningkatan kondisi, peran, dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan pada anak (sumber : dokumen pribadi program kerja P2TP2A)

Adapun tujuan khusus P2TP2A yaitu untuk menyediakan data menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan dengan cara sebagai berikut :

1. Mendorong penyedia sarana, prasarana dan berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak.
2. Membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/ kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Suryadi selaku Ketua Wadul Bae dan Ibu Sрни Piyanti selaku Bidang Advokasi Pendampingan yang mana beliau-beliau adalah tangan pertama pendiri Program Wadul Bae, mengatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari P2TP2A, dibuatlah strategi berbentuk program-program, yang mana salah satu

program unggulan pemerintah di P2TP2A adalah program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Mboke). Program Wadul Bae adalah program jejaring untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Untuk membuat sebuah nama unik seperti “Wadul Bae” membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan lamanya, mengambil nama program menggunakan bahasa lokalisasi karena, setiap harinya Warga Kota Cirebon menggunakan bahasa lokal yaitu Bahasa Cirebon. Awalnya memang hanya ingin bernama “Warga Peduli Bocah Lan Mboke” namun, ada seorang sesepuh Kota Cirebon yang ikut berkontribusi dalam menyajikan program ini, yang mana sesepuh tersebut mengusulkan untuk menyingkat program itu menjadi “Wadul Bae”, arti dari “Wadul Bae” sendiri adalah “laporkan saja”, yang mana secara tidak langsung warga di giring untuk paham betul terkait isi dari kegiatan program tersebut. Wadul Bae telah dijalani sebelum didirikannya P2TP2A, sebelumnya program Wadul Bae hanyalah program yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akan tetapi semenjak diwajibkannya seluruh daerah di Indonesia untuk mendirikan P2TP2A, Pemerintah Kota Cirebon menggandeng program Wadul Bae dan menjadikan program tersebut menjadi bagian dari program pemerintah, melalui P2TP2A dan DSPPA Kota Cirebon. Menurut ungkapan dari Pak Suryadi selaku Ketua Program Wadul Bae, alasan penggabungan antara P2TP2A dan Program Wadul Bae dikarenakan, dua jejaring ini memiliki tujuan yang sama, dengan pengalaman dan ilmu yang jika digabungkan menjadi suatu yang kuat untuk membantu permasalahan perempuan dan

anak di Kota Cirebon. Berawal dari hampir semua kepengurusan di P2TP2A adalah PNS yang mempunyai cukup ilmu pengetahuan untuk mendidik dan membuat suatu inovasi program, dan kepengurusan Wadul Bae yang hanya mempunyai beberapa orang yang berprofesi sebagai PNS, namun orang-orang didalamnya cukup berpengalaman dalam membantu permasalahan tersebut, maka pemerintah mengusulkan untuk menggabungkan Wadul Bae menjadi bagian dari Program P2TP2A Kota Cirebon (sumber: hasil wawancara bersama Ibu Sрни Piyanti selaku Bidang Advokasi Pendampingan pada tanggal 9 Januari 2018 dan Pak Suryadi selaku Ketua Wadul Bae pada tanggal 12 Maret 2018).

Awal mula terbentuknya Wadul Bae adalah pada saat tahun 2001-2004 karena adanya sebagian warga Kota Cirebon yang peduli dan prihatin terkait isu-isu kekerasan seksual di Kota Cirebon yang semakin meningkat. Akhirnya, awal tahun 2005 dibentuknya suatu program yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang semakin tahun semakin memprihatinkan dan menjadi permasalahan sosial yang cukup serius. Wadul Bae dibentuk dengan tujuan, agar masyarakat Kota Cirebon lebih berani melapor tindakan-tindakan kekerasan yang dialami oleh orang-orang disekitarnya, seperti keluarga dan tetangganya (sumber: hasil wawancara bersama Pak Suryadi selaku Ketua Wadul Bae pada tanggal 4 Januari 2018 dan Ibu Sрни Piyanti selaku Bidang Advokasi Pendampingan pada tanggal 9 Januari 2018). Tujuan lainnya dari program Wadul Bae ini adalah sebagai berikut :

1. Melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di tingkat RT RW dan Kelurahan di Kota Cirebon.
2. Membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perempuan dan anak, seperti kekerasan dan diskriminasi.
3. Menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar warga Kota Cirebon lebih berani dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak

Program Wadul Bae berpacu dalam visi dan misi yang jelas, yaitu sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman bebas dari tindakan kekerasan anak dan perempuan di Kota Cirebon

Misi :

1. Membangun kinerja Wadul Bae yang solid, terbuka, terdepan, dan efektif demi tercapainya tujuan.
2. Memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak anak dan perempuan di Kota Cirebon
3. Melaksanakan sosialisasi tentang UUPA dan KDRT agar berkesinambungan, bertanggung jawab, dan berpotensi.

Untuk membuat suatu program seperti Wadul Bae diperlukannya beberapa pertimbangan, yaitu seperti dasar-dasar hukum terkait konteks dari pembuatan program tersebut, berikut adalah dasar-dasar hukum

pembentukan P2TP2A dan program Wadul Bae yang menjadi pertimbangan pembuatan program Wadul Bae, ialah:

1. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
2. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi Korban
4. UU No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Pada tahun 2002 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mendorong pembentukan P2TP2A di seluruh Indonesia untuk memperdayakan perempuan dan anak
6. Pada tahun 2005 LSM Wadul Bae di SK an oleh WaliKota Cirebon
7. Keputusan WaliKota Cirebon No. 463.05/KEP.166-BPMPPKB/2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Cirebon sekaligus menggandeng program Wadul Bae untuk ikut dalam P2TP2A

Tidak boleh mati gaya ketika pelayanan dari pemerintah tidak ada, akhirnya di buatlah program Wadul Bae, yang akhirnya ujung-ujungnya di resmikan juga oleh pemerintah biarpun tanpa diberikan anggaran” Tuter Sрни Piyanti selaku Psikolog PPT dan Bidang Advokasi dan Perlindungan di P2TP2A

Adapun tugas pokok masing-masing bidang di P2TP2A pada program Wadul Bae yang peneliti dapat dari dokumen pribadi bidang-bidang P2TP2A, yaitu :

1. Bidang Pelayanan dan Pemulihan

Pada bidang ini bertugas untuk melayani masyarakat baik yang sudah menjadi korban, maupun pencegahan pada masyarakat. Tugas pada bidang ini meliputi, mendata korban-korban kekerasan pada perempuan dan anak, pendataan tersebut dilakukan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pelayanan dan pemulihan yang dibagi menjadi dua yaitu pelayanan darurat, yang bekerjasama dengan Puskesmas dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati dan Pelayanan pemulihan, yang mana dalam pelayanan ini adanya pelayanan pengobatan dan perawatan, pelayanan konseling untuk mental psikologi, penyuluhan dan sosialisasi untuk masyarakat, dan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

2. Bidang Hukum dan HAM

Bidang ini bertugas dalam mensosialisasikan terkait hukum dan hak-hak asasi manusia, lalu bertugas dalam advokasi hukum atau pendampingan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

3. Bidang Advokasi dan Pendampingan

Dalam bidang ini bertugas untuk mendampingi korban kekerasan, satu korban atau satu kasus didampingi selama 12 bulan, bertugas dalam melakukan kunjungan kerumah korban, dan mengurus

pertemuan seluruh pengurus Wadul Bae dalam waktu satu bulan satu kali, mengurus pertemuan dengan kader Wadul Bae dalam waktu tiga bulan satu kali, dan mengurus data pelaporan.

4. Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan

Bidang ini bekerjasama dengan bidang hukum dan HAM dalam mengsosialisasikan terkait hukum dan HAM di 22 kelurahan, melakukan pembinaan pendampingan para anak jalanan melalui kegiatan pelayanan, dan melakukan pelatihan pendampingan untuk para Kader Wadul Bae.

5. Bidang Jejaring dan Kemitraan

Pada bidang ini menjalin kerjasama dengan jejaring lainnya, seperti Rumah Zakat, Zakat Center, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Dunia usaha lainnya.

Selain penjelasan beberapa bidang-bidang terkait penelitian, berikut adalah susunan keanggotaanyang lengkap dari P2TP2A tahun 2015-2020 yang telah di SK kan oleh Wali Kota Cirebon nomor 463.05/Kep.26-BPMPPKB/2015 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2015-2020 dalam website P2TP2A.Cirebonkota.go.id yaitu sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : WaliKota Cirebon

2. Penasehat :

1) WaliKota Cirebon

- 2) Sekretaris Daerah Kota Cirebon
 - 3) Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
 - 4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
3. Pembina :
- 1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
 - 2) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon
4. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cirebon
5. Wakil Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Cirebon.
6. Ketua Harian : Drg. Siska Liliana Muliadi (Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon).
7. Sekretaris I : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
8. Sekretaris II : Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon

9. Bendahara : Kepala Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

10. Bidang-Bidang :

a. Bidang Pelayanan dan Pemulihan :

Koordinator : Dr. Hj. Junny Setyawati, M.KM (Kepala UPTD Puskesmas Kesunean pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon)

Anggota :

- 1) Dr. Dian Novitasari, MARS (Kepala Seksi Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis di RSUD Gunung Jati)
- 2) Dr. Hj. Walyanah, MH. Kes (Kepala UPTD Puskesmas Kalitanjung pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon).
- 3) Tik Tik Masnurliawati, SST. MH. Kes (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon).
- 4) Elin Cahyawati, SKM. M.Si (Kepala UPTD Puskesmas Cangkol

b. Bidang Advokasi dan Pendampingan :

Koordinator : Sрни Piyanti, P. Si (Psikolog Rehab Medik di
RSUD Gunung Jati Kota Cirebon)

Anggota :

- 1) Sidik Lingga Kusuma, SH. Ssi. Apt (Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon).
- 2) Hj. Sri Pulung Sari, S.Sos (Pimpinan Daerah Muslimah Kota Cirebon)
- 3) Devi S.S. Afiah, S.Pd.I M.Pd (Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga Kota Cirebon).
- 4) Endang Lestari, S.Pd (Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

c. Bidang Hukum dan HAM :

Koordinator : Indrawati, SH (Kepala Unit Perlindungan Perempuan Anak Polresta Cirebon)

Anggota :

- 1) Ali Syamsu A, SH (Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Cirebon).

- 2) Fery Djunaedi, SH. MH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon).
- 3) Imam Ahmad Gt, A.K.S. M.Si (Kepala Seksi Bimbingan Kerja BKA pada Balai Perasyarakatan Kelas I Cirebon).
- 4) Ganis Hermawan, SH (Kepala UPTB-KB pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota).
- 5) Diding Rahmat SH. MH (Lembaga Bantuan Hukum Kota Cirebon).
- 6) Unsur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Unswagati Cirebon.
- 7) Unsur Pos Bantuan Hukum Kota Cirebon.

d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial :

Koordinator : Ny. Hj. Tien Mediana (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Cirebon).

Anggota :

- 1) Dalhari, SH (Kepala Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cirebon).

- 2) Drs. Deni Hernadi (Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).
- 3) Drs. Saefudin Jupri (Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon).
- 4) Sri Hartati, SE (Kepala UPTD Rumah Perlindungan Sosial Anak pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon).
- 5) Ir. Hj. Tien Hinasah (Tim Penggerak PKK Kota Cirebon).

e. Bidang Informasi dan Komunikasi :

Koordinator : Sugiyono S.Sos (Kepala Sub Bidang Informasi dan Data Keluarga Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Cirebon)

Anggota :

- 1) Dra. Riani Oktawati, MM (Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon).
- 2) Hermilian Eka Yulianto, SKM (Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).
- 3) Dodi Solehudin, ST. MT (Kepala Sub Bagian Publikasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Cirebon).
- 4) Iwan Wahyu Sejati, SE (Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).
- 5) Aan Siti Hasanah, S.KM (Pelaksana Bidang Administrasi Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Cirebon).

6) Abdullah (Harian Radar Cirebon).

f. Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan

Koordinator : Hj. Wiranti Triastuty, SE. MM (Sekretaris pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Cirebon).

Anggota :

- 1) Dra. Titin Suhermawati (Kepala Sub Bidang
Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Cirebon).
- 2) Dra. Hj. Siti Halimah (Sekretaris pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon).
- 3) Ir. Iin Inayati (Kepala Seksi Keamanan
Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota
Cirebon).
- 4) Eti Surati (Forum BKB Kemas Kota
Cirebon).
- 5) Unsur Wadul, Bae.

g. Bidang Jaringan dan Kemitraan :

Koordinator : Iing Daiman, S.IP. M.Si (Sekretaris pada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Cirebon).

Anggota :

- 1) Dra. Ani Nur Sunarti, M.Pd (Sekretaris pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon).
- 2) Drs. Yayat Supriyatna (Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon).
- 3) Drs. Tatang Sutisna (Kepala Seksi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon).
- 4) Lis Triswanah, S.KM (Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).
- 5) Iin Indawati, S.Si. M.Farm. Apt (Akademi Farmasi Muhammadiyah Cirebon).

C. Profil Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati

Sejak tanggal 1 Januari 2014 telah didirikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gunung Jati Kota Cirebon untuk memberikan pelayanan bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak dengan mengedepankan pelayanan yang komperhensif dan holistik meliputi medis atau medikolegal, psikologis, sosial dan hukum. Adapun tujuan dari PPT RSUD Gunung Jati adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
2. Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

PPT RSUD Gunung Jati Kota Cirebon memiliki lima jenis pelayanan yaitu sebagai berikut :

1. Penanganan pengaduan atau laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
3. Rehabilitas sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
4. Penegak dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan

5. Pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan

D. Profil Pihak Kemitraan

Berikut adalah beberapa informasi terkait profil beberapa lembaga yang menjalin kemitraan bersama DSPPPA, yang mana turut bekerja sama dalam pengembangan program Wadul Bae, yaitu sebagai berikut :

1. Rumah Zakat, lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (Pendidikan), Senyum Sehat (Kesehatan), Senyum Mandiri (Pemberdayaan Ekonomi), serta Senyum Lestari (Inisiatif Kelestarian Lingkungan) (<https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018).
2. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan demikian, Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelola zakat yang berasaskan : syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritasi dan akuntabilitas. (<http://pusat.baznas.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 12 Februari

2018). Dari hasil wawancara bersama Pak Dwi selaku Ketua Baznas Kota Cirebon pada tanggal 1 Ferbruari 2018, Baznas Kota Cirebon selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Sosial, terutama dalam penyaluran. Baznas adalah penyalur zakat, sasaran penyalurnya pasti fakir miskin. Ada lima hal yang menjadi fokus utama dalam program Baznas, yaitu :

- a. Cirebon Pintar, berkaitan dengan pendidikan
- b. Cirebon makmur, berkaitan dengan pemberdaya guna ekonomi
- c. Cirebon sehat, berkaitan dengan kesehatan
- d. Cirebon Taqwa, berkaitan dengan keislaman
- e. Cirebon Peduli, berkaitan dengan kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kota Cirebon

3. Zakat Center, sebuah Lembaga Amil Zakat yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan, didukung dengan program-program yang sesuai. Zakat Center menerima dan menyalurkan zakat, infaq atau sedekah dan wakaf melalui program-program Zakat Center (<https://www.facebook.com/pg/ZCTeam/about/>,<http://www.zakatcenter.org/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018).

E. Profil Informan

Memilih informan, subjek, dan objek penelitian menjadi nilai penting agar masalah yang akan dibahas pada penelitian jelas dan tidak meluas ke berbagai macam arah. Peneliti disini mengambil informan, subjek, dan

objek penelitian sesuai dengan judul penelitian. Maka sasaran penelitian ini yang sesuai dengan kriteria adalah :

1. Informan dari Pemerintah DSPPPA, Ibu Siti Halimah selaku Pekerja Sosial Penanganan Kasus Anak dan Ibu Mamah selaku Bidang Perlindungan Anak.
2. Informan dari P2TP2A, Drg. Siska Liliana Muliadi selaku ketua harian P2TP2A, Bapak Suryadi selaku Ketua Program Wadul Bae dan Ibu Sрни Piyanti S. Psi selaku penanganan di bidang Advokasi dan Pendampingan.
3. Informan dari PPT, Ibu Sрни Piyanti S. Psi selaku Psikolog dan Ibu Erna Kustiana selaku Pekerja Sosial Medis.
4. Informan Pihak Kemitraan, ada tiga kemitraan yang peneliti ambil menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu :
 - a. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon, Dr. Ir. H. Dwi Budi Satrio Novianto., MM selaku Ketua Cabang Baznas Kota Cirebon.
 - b. Zakat Center Kota Cirebon, M. Anwar Musaddad, S.Ag., M.Si selaku Direktur Eksekutif Zakat Center Kota Cirebon.
 - c. Rumah Zakat Kota Cirebon, Iman Handiman selaku *Branch Manager* Kota Cirebon.